

## BAB 2

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Dalam BAB ini akan disampaikan data dan penjelasan terkait evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 serta pencapaian Indikator Kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebagai gambaran tingkat pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian untuk memberikan pemahaman terkait kondisi Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu akan disampaikan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi Provinsi DKI Jakarta.

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Provinsi DKI Jakarta

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

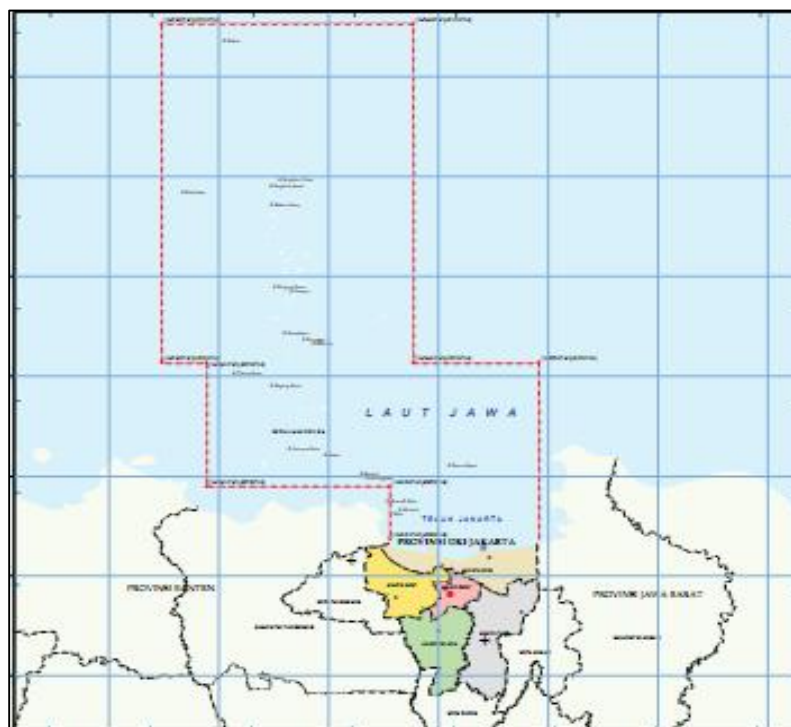
###### A. Kondisi Geografis

Informasi mengenai kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan berupa batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi sebagai berikut :

DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi  $6^{\circ} 12'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 48''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah  $7.639,83 \text{ km}^2$ , dengan luas daratan  $662,33 \text{ km}^2$  (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan  $6.977,5 \text{ km}^2$ .

Adapun Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar I.1 di bawah ini.

**Gambar 2.1** Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta



Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Batas sebelah Utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*, Sebagian besar karakteristik wilayahnya berada di bawah permukaan air laut pasang, mengakibatkan rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Sebelah Barat Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten, dan di sebelah Selatan dan Timur Jakarta berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut. Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1 - 1,5 meter di bawah muka laut pasang.

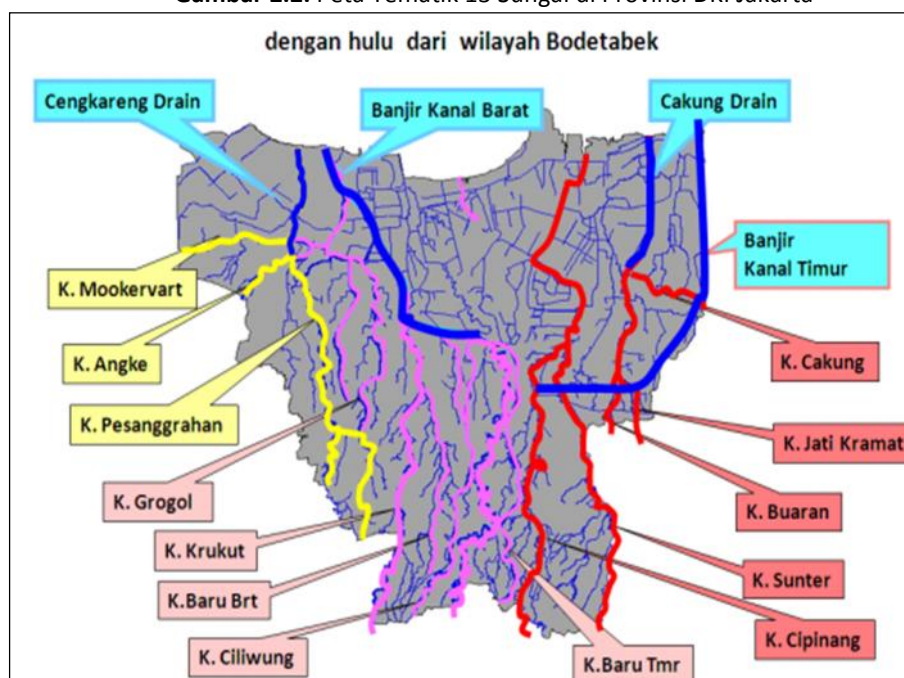
Secara geologis, seluruh wilayah Jakarta merupakan dataran alluvial, yang materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air sungai yang mengalir pada wilayah tersebut. Di samping itu, wilayah Jakarta terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan tanah dimana bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 kilometer. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun oleh endapan *alluvium*.

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu sekitar 155 km<sup>2</sup>. Wilayah ini membentang dari timur sampai barat sepanjang kurang lebih 35 kilometer, dan menjorok ke darat antara 4 - 10 kilometer. Wilayah pesisir Jakarta merupakan pantai beriklim panas dengan rata-rata suhu 28,5°C dan rata-rata kelembaban 72 persen.

Di samping wilayah pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pulau-pulau kecil yang terletak di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah ini memiliki luas beragam, sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 (lima) hektar, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5-10 hektar, dan hanya 30 persen yang luasnya lebih dari 10 hektar. Pulau-pulau memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, iklim tropis panas dan kelembaban berkisar antara 75-99 persen. Dari pulau-pulau kecil tersebut, pulau yang dihuni oleh penduduk hanya berjumlah 11 pulau.

Berdasarkan letaknya Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (delta city) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Kota delta Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut.

Tiga belas sungai yang melewati Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Tiga belas sungai tersebut yaitu Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Disamping itu, sebagai sarana pengendali banjir, telah dibangun 2 (dua) kanal besar yaitu Kanal Banjir Barat yang memotong Kali Ciliwung dan Kanal Banjir Timur yang memotong Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter dan Kali Cipinang. Peta sungai dan kanal yang melewati wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.2.** Peta Tematik 13 Sungai di Provinsi DKI Jakarta

Luas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta menurut enam wilayah administrasi, yang terdiri dari 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km<sup>2</sup>, Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km<sup>2</sup>, Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km<sup>2</sup> dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan 8,70 km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.1** Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	393	4.643
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	440	5.128
3	Jakarta Timur	188,03	10	65	700	7.867
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	570	6.124
5	Jakarta Barat	129,54	8	56	580	6.411
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		662,33	44	267	2.707	30.300

Sumber : diolah dari Jakarta Dalam Angka 2013 BPS DKI Jakarta dan Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta

## B. KONDISI DEMOGRAFIS

Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Jakarta diperkirakan sebanyak 10.090.301 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.087.087 jiwa dan perempuan 5.003.214 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (sex ratio) tercatat 101,68.

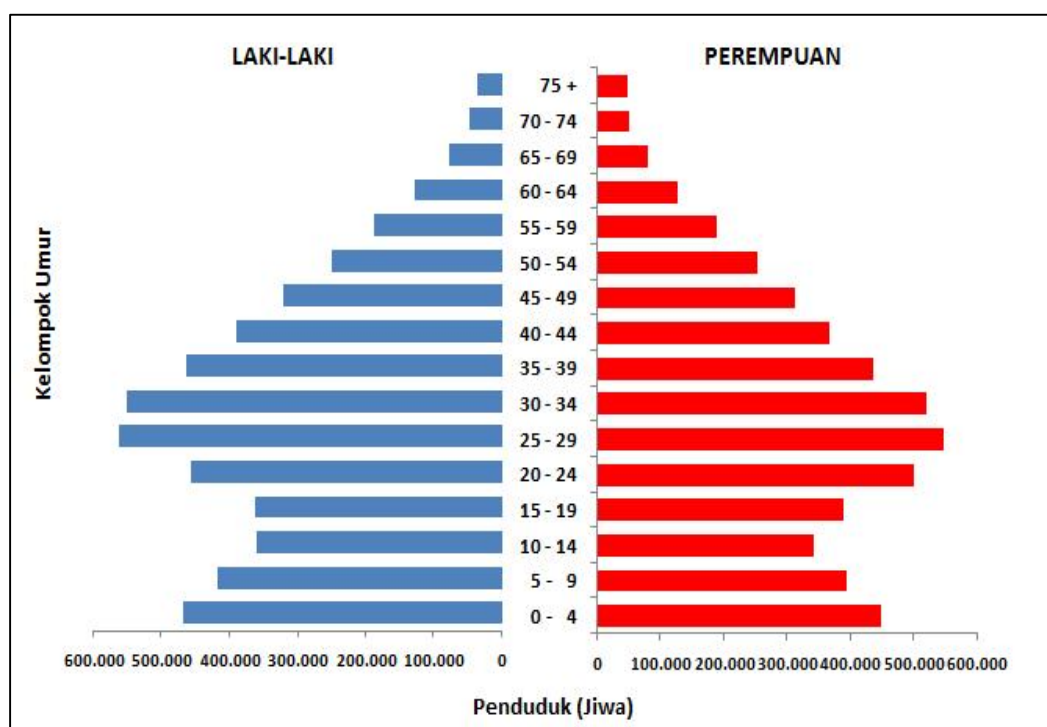
Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2013 penduduk laki - laki lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan perbandingan sekitar 102:100.

**Tabel 2.2** Penduduk Provinsi DKI Jakarta

No	Uraian	Satuan	SP2000	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah	Jiwa	8.347.083	9.607.787	9.761.992	9.991.788	10.090.301
2	Laki – Laki	Jiwa	4.223.125	4.870.938	4.950.228	5.042.874	5.087.087
3	Perempuan	Jiwa	4.123.958	4.736.849	4.811.764	4.948.914	5.003.214
4	Pertumbuhan	%	0,14	1,43	1,61	1,01	0,99
5	Densitas	Jiwa/Km <sup>2</sup>	12.603	14.506,1	14.783,9	15.085,8	15.234,6
6	Sex Ratio	%	102,00	103,00	102,16	101,90	101,68

Sumber : Statistik Daerah BPS Provinsi DKI Jakarta,2013

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2013 sekitar 0,99 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 15.234,6 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Grafik 2.1** Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2013

Dari piramida penduduk di atas dapat dilihat bahwa komposisi penduduk DKI Jakarta, didominasi oleh penduduk usia produktif yakni 15 – 64 tahun sebesar 7.317.938 jiwa atau sebesar 72,52%. Persentase penduduk yang belum produktif yakni 0 – 14 tahun sebesar 2.429.343 jiwa atau 24,08%, sedangkan penduduk yang tidak produktif lagi/melewati masa pensiun berjumlah 343.020 atau 3,40%. Dengan demikian dependency ratio (DR) pada tahun 2013 sebesar 27,48% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 27,48 penduduk usia tidak produktif.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

##### - Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta pada tahun 2013 sebesar 6,11 persen. Lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan yang dicapai pada tingkat nasional pada periode yang sama yang sebesar 5,78 persen. Namun demikian angka ini masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Jakarta yang dicapai pada tahun 2012 yang sebesar 6,53 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2013 disebabkan masih belum stabilnya perekonomian global yang kemudian mengurangi permintaan produk DKI Jakarta (ekspor). Sebagai dampaknya melambatnya kegiatan di sektor produksi berimbas pada melambatnya konsumsi rumah tangga.

Grafik 2.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta



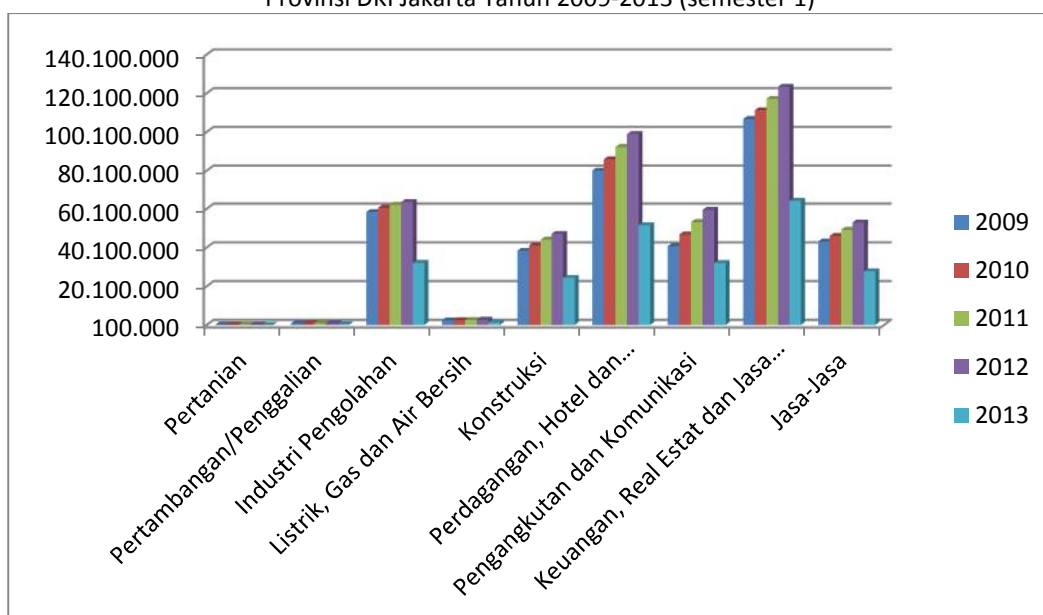
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2013)

##### - PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan ekonomi Jakarta pada tahun 2013 melambat dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp 1.255,9 triliun, sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 152,23 triliun atau sebesar 13,79 %.

**Grafik 2.3.** Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2013

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2013)

**Grafik 2.4.** Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2013 (semester 1)

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2013)

#### - Inflasi

Laju inflasi Jakarta lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2008 inflasi DKI Jakarta sebesar 11,11, merupakan inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2009 menurun drastis menjadi 2,34 persen sementara tahun 2010 laju inflasi meningkat kembali, yaitu mencapai 6,21 persen. Tahun 2011 inflasi kembali menurun dan hanya 3,97 persen, tahun 2012 inflasi sedikit meningkat mencapai 4,52 persen dan inflasi tahun 2013 kembali meningkat menjadi 8,00 persen.

Penyebabnya utama inflasi DKI Jakarta melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013. Namun demikian, inflasi DKI Jakarta tahun 2013 ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38%.

Grafik 2.5. Grafik Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta



(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2013)

Struktur perekonomian dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Provinsi DKI Jakarta. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian Jakarta pada tahun 2013, bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB (atas dasar harga berlaku), didominasi oleh sektor jasa (tersier) yang memiliki peranan sebesar 72,21 persen. Pembentuk sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 20,66 persen; Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan sekitar 27,69 persen; dan kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,35 persen, serta Sektor Jasa-jasa sebesar 12,75 persen. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (*service city*).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 15,61 persen, sedangkan sektor konstruksi sebesar 11,44 persen. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 0,56 persen yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,09 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,47 persen.

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 126,12 juta rupiah atau meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2012 (111,91 juta rupiah).

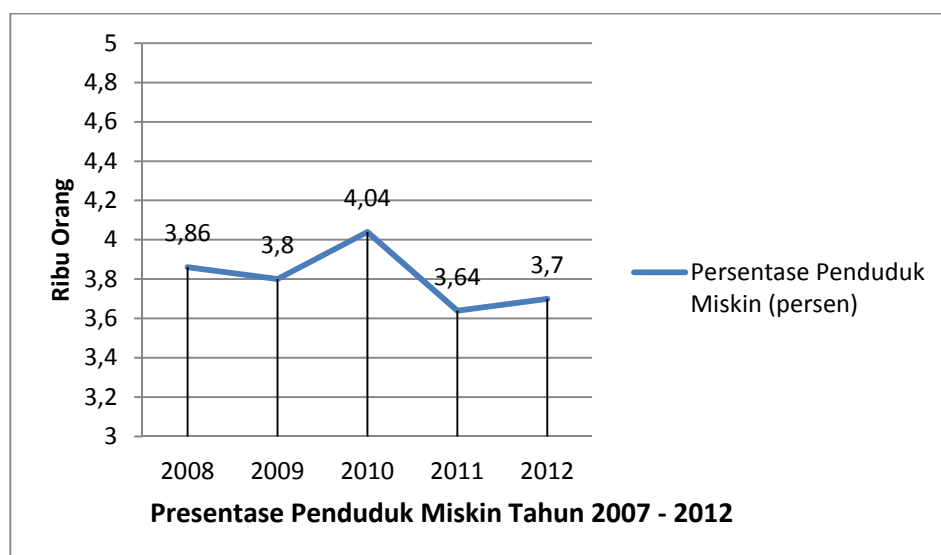
**Grafik 2.6.** PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2013)

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Gini ratio DKI Jakarta pada periode 2008-2012 yang relatif tidak berubah, mengindikasikan / menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,381 pada tahun 2008 dan 0,398 pada tahun 2012. Ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan dengan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 15,67 persen total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan Jakarta pada posisi bulan Juli tahun 2008 tercatat 342,6 ribu jiwa (4,29 persen). Selanjutnya pada Juli tahun 2009 mencapai 339,60 ribu jiwa (3,48 persen), pada Juli tahun 2010 tercatat 388,20 ribu (3,48 persen) dan pada September tahun 2011 tercatat 355,20 ribu (3,75 persen). Tercatat bahwa sampai dengan Maret 2012, secara makro penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta menjadi 366,7 ribu jiwa atau sebesar 3,69 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada gambar berikut.



**Grafik 2.7.** Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta pada periode 2007-2012

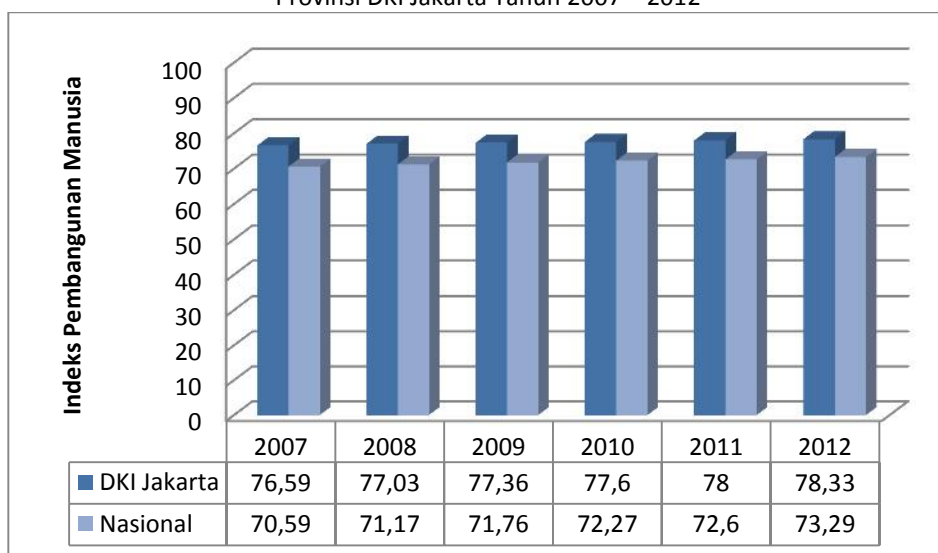
(Sumber: Jakarta Dalam Angka 2013)

#### - Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan manusia. Secara teknis, IPM merupakan gabungan dari 3 indeks, yaitu : Indeks Pendidikan, yang meliputi tingkat melek huruf/ Angka Melek Huruf (AMH) dan lamanya pendidikan/ Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks/ Angka Harapan Hidup (AHH) (kesehatan), dan Indeks Daya Beli/ Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil (ekonomi). Kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja pembangunan pada suatu daerah. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

**Grafik 2.8.** Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012



(Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2014)

Selama tahun 2012 IPM DKI Jakarta tercatat sebesar 78.33, lebih tinggi dari rata-rata IPM yang dicapai nasional yang sebesar 73,29. Pada level provinsi IPM DKI Jakarta adalah yang tertinggi diantara provinsi-provinsi lainnya. Sementara untuk level kabupaten/kota, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Jakarta selatan, yaitu sebesar 80,17 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu sebesar 71,45.

Komponen IPM lainnya yakni Angka Melek Huruf (AMH) juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2012 meningkat dari 99.15 persen menjadi 99,21 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir sebagian besar penduduk provinsi DKI Jakarta mampu untuk membaca dan menulis serta menyerap informasi yang ada. Persentase angka melek huruf yang tinggi di Provinsi DKI Jakarta ini juga mengindikasikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,95 tahun menjadi 10,98 persen. Berbagai kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti kebijakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian ini, disamping meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta.

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dipertahankan di atas 100 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari 87,25 persen pada tahun 2012 menjadi 91,74 persen pada tahun 2013.

#### - Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan ditekankan kepada peningkatan kemandirian dan berdaya saing. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya saing dari 10% pada tahun 2012 menjadi

12% pada tahun 2013. Selain itu, pembinaan terhadap kepramukaan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah anggota pramuka yang aktif dari 215.400 orang pada tahun 2012 menjadi 562.462 orang pada tahun 2013 dan meningkatnya persentase gugus depan pramuka yang aktif dari 60% pada tahun 2012 menjadi 65% pada tahun 2013.

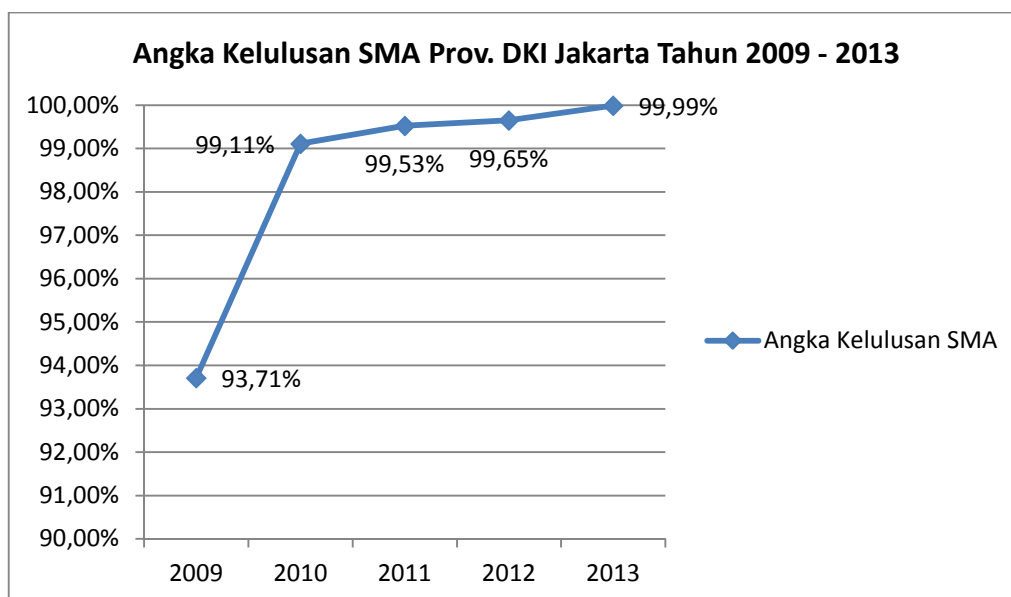
Selain itu, Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengembangkan sarana olahraga. Fasilitas olahraga tersebut ditunjukkan dengan beroperasinya Gelanggang Remaja di 35 Kecamatan dan meningkatnya jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar dari 0 Gelanggang Remaja Pada tahun 2012 menjadi 7 Gelanggang Remaja Pada Tahun 2013. Jumlah Gelanggang Olahraga yang memenuhi memiliki fasilitas sesuai standar dari 0 di tahun 2012 ditingkatkan menjadi 2 Gelanggang Olahraga pada Tahun 2013, yaitu Gelanggang Olahraga Ciracas dan Gedung Menza Ragunan serta dipertahankannya jumlah stadion olahraga yang beroperasi sebanyak 1 buah stadion, yaitu Stadion Lebak Bulus. Prestasi ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pengguna fasilitas olahraga dan pemuda dari 4.099.652 orang pada tahun 2012 menjadi 4.361.520 orang pada tahun 2013.

Terkait dengan pengembangan olahraga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya maksimal dan berhasil mempertahankan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 34% dengan meningkatkan frekuensi event olahraga Rekreasi dari 4 kali dalam sebulan pada tahun 2012 menjadi 8 kali dalam sebulan pada tahun 2013. Adapun prestasi olahraga dan pemuda yang diraih DKI Jakarta pada single event dan multi event dalam dan luar negeri antara lain: Juara Umum POPNAS XII/2013 di Provinsi DKI Jakarta dan Juara Umum POMNAS XIII/2013 di Provinsi DI Yogyakarta. Memperoleh 4 Medali Emas, 24 perak dan 21 perunggu pada Special Olympic 2013 Asia Pacific Games Australia.

### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

#### **A. Pendidikan**

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Provinsi DKI Jakarta salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Di tingkat SD, berhasil dipertahankannya tingkat kelulusan sebesar 100%; kemudian meningkatnya persentase kelulusan SMP dari 99,99 % pada tahun 2012 menjadi 100 % pada tahun 2013, persentase kelulusan SMA meningkat dari 99,65 % pada tahun 2012 menjadi 99,99 % pada tahun 2013, dan persentase kelulusan SMK dari 99,92 % pada tahun 2012 menjadi 99,99 % pada tahun 2013.

**Grafik 2.9.** Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta tahun 2009-2013

(Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2013)

Tingkat pendidikan yang ditamatkan juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak sekolah dan belum tamat SD terus berkurang.

**Tabel 2.3.** Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008 – 2012

Jenis Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Tidak Sekolah dan Belum Tamat SD	13,40	10,53	9,15	10,36	9,65
Sekolah Dasar	19,85	20,25	21,62	18,75	17,75
Sekolah Lanjutan Pertama	19,61	19,79	20,37	19,38	19,86
Sekolah Lanjutan Atas	30,52	35,78	35,96	37,27	37,99
Akademi/Universitas	16,61	13,65	13,90	14,24	14,46
Jumlah	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

(Sumber: Jakarta Dalam Angka 2013)

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan program yang menunjang pemberian BOS oleh Pemerintah Pusat. Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Pemberian BOP meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, BOP telah diberikan kepada 667.596 siswa SDN/MIN, 226.532 siswa SMPN/MTsN, dan 101.396 siswa SMAN/MAN, serta 44.412 siswa SMKN. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

juga telah menerbitkan dan mendistribusikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 403.864 peserta didik.

## B. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Jakarta telah menunjukkan pencapaian yang positif.

Pengembangan prasarana dan sarana Puskesmas terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 dikembangkan sebanyak 6 Puskesmas Kecamatan menjadi Rawat Inap selain Rumah Bersalin (RB) sehingga total menjadi 25 Puskesmas Rawat Inap selain Rumah Bersalin (RB). Selain itu dilakukan penambahan kapasitas 170 tempat tidur kelas tiga RSUD sehingga total menjadi 1.615 tempat tidur kelas tiga dan menyediakan pelayanan kesehatan Masyarakat di 15 pasar tradisional dan 6 rumah susun.

Sebagai bagian pembinaan upaya kesehatan, telah dibentuk Kelurahan Siaga Aktif di 206 Kelurahan serta meningkatkan kemampuan teknis konseling pada usia lanjut bagi petugas. Dalam mengendalikan penyakit dan penyehatan lingkungan, dilakukan Pengendalian kualitas vaksin dan manajemen program Immunisasi, masalah kesehatan dan KLB, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Penyakit menular, Penyakit Bersumber Binatang serta pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Neglected Disease.

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2012 jumlah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 14.327 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan.

**Tabel 2.4.** Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2009 – 2012

TENAGA KESEHATAN	2009	2010	2011	2012
Dokter Umum	896	2.873	2.484	2.886
Dokter Spesialis	1.988	1.386	4.232	5.506
Dokter Gigi	725	586	725	1.102
Apoteker	758	1.886	508	271
Asisten Apoteker	108	1.052	1.142	2.164
Bidan	1.317	1.897	2.111	2.398

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2013

## C. Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi.

Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir.

Sebagai bagian dari pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir, telah dilakukan pengembangan situ, waduk dan embung serta penguatan tanggul sheet pile. Kemudian dalam melaksanakan pengembangan sistem drainase, telah dilakukan pengembangan sistem polder, normalisasi sungai dan salurannya, serta pengerukan sungai dan salurannya.

Dalam peningkatan jaringan jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peningkatan jalan dengan membangun dan meningkatkan trotoar serta melebarkan jalan disamping melakukan perbaikan jalan yang diakibatkan oleh bencana banjir yang berakibat kepada rusaknya jalan disejumlah wilayah DKI Jakarta.

**Tabel 2.5.** Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2012

URAIAN	JENIS SATUAN JALAN			JUMLAH
	JALAN NASIONAL		PROVINSI	
	TOL	NEGARA		
A. Panjang Jalan (m)	123.731,00	152.516,50	6.681.445,00	6.955.842,26
B. Luas Jalan (m <sup>2</sup> )	3.001.000,00	2.895.586,00	42.606.177,16	48.502.763,16

(Sumber : Jakarta Dalam Angka 2013)

Produksi dan Tata Airsampah Jakarta dilakukan dengan menangani persoalan persampahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan jasa pengelolaan 2.040.521 ton sampah di TPST Bantargebang serta swastanisasi penanganan kebersihan di 42 Kecamatan.

Selain itu, dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dilakukan Gerakan Diet Kantong Plastik untuk mendukung Gerakan Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik selama pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2013, melakukan pendampingan kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi bank sampah, serta menyelenggarakan Gerakan Jakarta Bersih di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

Selanjutnya dalam hal penyediaan air bersih, berdasarkan cara memperolehnya, konsumen air minum dikelompokkan menjadi dua, yakni membeli dan tidak membeli. Dikategorikan membeli apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan berlangganan PAM, membeli air kemasan, atau pedagang air keliling. Rumah tangga yang memperoleh air bersih dengan cara tidak membeli umumnya berasal dari air tanah, yakni sumur dan pompa. Hal ini dapat diartikan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air tanah. Berdasarkan atas hal tersebut, hingga tahun 2013 telah dilaksanakan konservasi air tanah melalui pengadaan meter air sebanyak 1.583 unit, sumur resapan 148,65 m<sup>3</sup>, dan lubang biopori 963.431 unit.

#### **D. Perumahan Rakyat**

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal. Pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk mensinergikan Pembangunan rumah susun sewa yang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olah raga.

Penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hingga tahun 2013 telah dilaksanakan penataan kampung deret di 26 lokasi yaitu: Jakarta Pusat 10 lokasi (2.434 unit); Jakarta Utara 6 lokasi (230 unit); Jakarta Barat 3 lokasi (367 unit); Jakarta Selatan 3 lokasi (602 unit); Jakarta Timur 4 lokasi (834 unit).

Disamping melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, juga dilakukan penataan lingkungan yang masih masuk kedalam kategori RW Kumuh pada 142 RW disejumlah wilayah DKI Jakarta.

#### **E. Penataan Ruang**

Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) wilayah kabupaten/kota administrasi. Atas hal tersebut, pada tahun 2013 telah dilaksanakan finalisasi Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Disamping hal diatas, Pemerintah DKI Jakarta telah menyusun kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan berupa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan, Ketentuan Teknis Bangunan, dan Ketentuan Pelaksanaan Konstruksi dan Pemanfaatan Bangunan Gedung.

Guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ketatakotaan, pelayanan telah dilakukan sesuai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat perangkat daerah urusan penataan ruang pada 32 kecamatan dan 5 Suku Dinas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase kepuasan masyarakat pemohon pelayanan dari 70 % pada tahun 2012 menjadi 80% pada tahun 2013 dengan menggunakan sistem Administrasi Aplikasi Layanan (AAL).

Sebagai bagian pengawasan penertiban, telah diupayakan untuk meningkatkan pemberlakuan sistem online pengawasan penertiban bangunan menjadi pelayanan IMB online yang tidak hanya untuk pelayanan rumah tinggal tetapi juga untuk pelayanan bangunan lebih dari 8 lantai.

#### **F. Perhubungan**

Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan terus dikembangkan, sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Jakarta.

Dalam hal Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan, telah difungsikan Intellegence Transport System (ITS) pada koridor busway sampai dengan koridor 8. Sistem ini

merubah BTS (Bus Tracking System) menjadi fleet management yang tidak hanya memberikan informasi kedatangan bus pada koridor busway tetapi juga menginformasikan headway dari masing-masing bus di setiap koridor dan terus berupaya dalam pelaksanaan sterilisasi Jalur Busway. Pada tahun 2013 telah terbentuk Perda tentang pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta. Pengoperasian Bus Trans Jakarta ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang busway per hari sebanyak 304.799 pnp/hari (2012) menjadi 308.281 pnp/hari (2013), selain itu terus diupayakan dan berhasil meningkatkan headway rata-rata busway 20 menit (2012), menjadi 15,8 menit (2013). Serta meningkatkan jumlah armada Busway dari 669 unit (2012) menjadi 794 unit (2013).

Upaya dalam pelaksanaan proyek Mass Rapid Transit (MRT), telah menambah pembebasan lahan di Lebak Bulus untuk Depo seluas 19.059 m<sup>2</sup> (2012) menjadi 21.426 m<sup>2</sup> (2013).

Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan dilakukan salah satu caranya dengan melakukan penertiban parkir on street dan berhasil mengurangi jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir on street dari 248 ruas (2012) menjadi 228 ruas (2013). Disamping terus menyediakan sarana transportasi umum yang memadai, Pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang antara lain pembahasannya berupa rancangan Perda tentang Transportasi, termasuk didalamnya pengaturan Electronic Road Pricing (ERP).

#### **G. Lingkungan Hidup**

Dalam hal pelestarian lingkungan, telah dilakukan upaya pelestarian melalui pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penataan taman, jalur hijau kota, TPU seluas 37.92 Ha dilakukan dengan rincian Taman 5.34 Ha, Jalur Hijau 9.96 Ha, dan Pemakaman 22.62 Ha. Meningkatnya jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/Interaksi Publik dari 6 lokasi (2012) menjadi 11 lokasi (2013). Meningkatnya luas lahan kota yang dibebaskan dari 41,38 Ha (2012) menjadi 85,79 (2013) dan mengembangkan Hutan Kota sebanyak 7 lokasi.

Dalam hal pencemaran udara, telah dilakukan pemantauan pencemaran udara dengan melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak. Hal tersebut ditunjukkan dengan berhasil dikurangnya tingkat pencemaran udara pada 119 kegiatan usaha dan 3361 kendaraan bermotor.

Pencemaran air juga telah diusahakan agar dampak negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin terhadap kehidupan masyarakat Jakarta. Modifikasi, peningkatan dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Limbah Septiktank Duri Kosambi dan Pulo Gebang dengan mencanagkan pembangunan IPAL sistem komunal melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

Kondisi air sungai di Jakarta memerlukan perhatian khusus menyangkut kualitasnya. Pada umumnya kondisi air sungai di DKI Jakarta dari hulu menuju hilir semakin kurang baik kualitasnya baik kualitas fisik, kualitas kimia maupun kualitas biologi. Selain kualitas air permukaan, degradasi kualitas air tanah juga mengalami penurunan



beberapa tahun belakangan ini, terutama terjadi di daerah - daerah yang semakin dekat dengan batas pantai.

#### H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Jakarta secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah keluarga berencana, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb dan kependudukan, advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi, bina ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

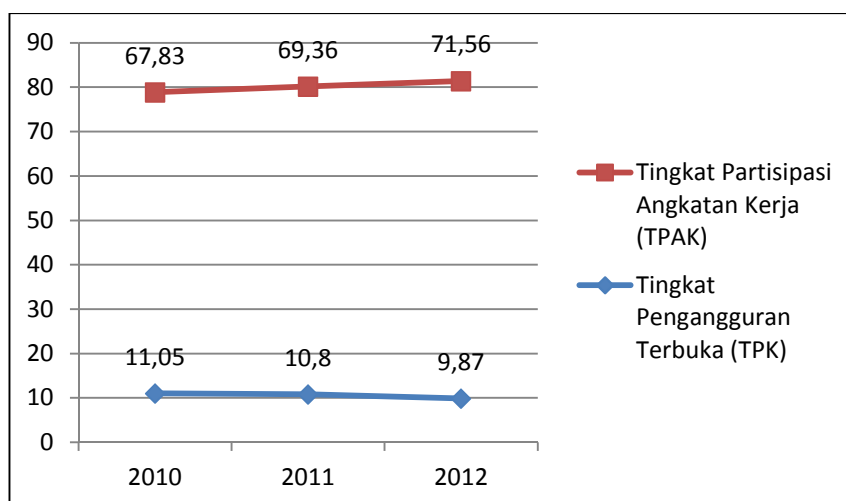
Hasil dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti Dipertahankannya Total Fertility Rate 2,3. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dari 1.041.081 peserta Tahun 2012 menjadi 1.050.086 peserta Tahun 2013. Meningkatnya persentase masyarakat yang memahami program KB dan Kependudukan dari 60% di tahun 2012 menjadi 63% di tahun 2013. Meningkatnya jumlah pengembangan dan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dari 296 PIK Remaja di tahun 2012 menjadi 324 PIK Remaja di tahun 2013.

#### I. Ketenagakerjaan

Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja mengalami kenaikan dari 25.341 orang pada tahun 2012 menjadi 156.755 orang di tahun 2013. Hal tersebut diimbangi oleh meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 16.453 perusahaan pada tahun 2012 menjadi 30.325 perusahaan di tahun 2013. Hal lain adalah, meningkatnya jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan sebanyak 4.426 orang di tahun 2012 menjadi sebanyak 4.480 orang pada tahun 2013.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta, dari tahun 2010 sampai tahun 2012 cenderung terus meningkat. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.10.** Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta



(Sumber : Kompilasi Jakarta Dalam Angka 2013 dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013)

## **J. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Jakarta.

Meningkatnya jumlah koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi dari 70 koperasi di tahun 2012 menjadi 140 koperasi pada tahun 2013. Selain itu, telah dilakukan peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja UMKM kepada para pengurus, pengelola dan pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

## **K. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Pada urusan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna terwujudnya pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip Good Governance.

Kebijakan pada urusan ini antara lain adalah telah dilakukan pendelegasian sebagian wewenang pemerintahan pada tingkat Kota Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam perkembangannya, 5 (lima) wilayah Kota Administrasi telah melakukan layanan satu pintu. Peningkatan pelayanan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah menghasilkan beberapa hasil, antara lain terlaksananya *Letter of Intens* kerjasama sister pertukaran bidang budaya dan pendidikan city dengan Shanghai Friendship City dan tersusunnya kesepakatan 3 Bidang Kerjasama dengan daerah perbatasan Jakarta meliputi Baku Mutu Air, Transportasi dan RTH.

Sebagai bagian pelayanan masyarakat, Pemerintah DKI telah menetapkan Perda nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, sudah dilaksanakan pembinaan Lembaga kemasyarakatan sebanyak 30.175 RT, 2.703 RW, 2.703 LMK, 267 Karang Taruna.

Dibidang penanggulangan bencana kebakaran, telah diperoleh cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam radius 1,75 km, tercapainya 50% petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamatan, tercapainya 5,4% rasio hidrant kering, 110% alat pemadaman api manual dan 17,8% tandon air terhadap kawasan kebakaran. Dalam hal prasarana penanggulangan kebakaran, telah meningkatnya rasio kantor sektor pemadam kebakaran terhadap jumlah kecamatan yang diikuti oleh kemampuan mengurangi rata-rata waktu pemadaman menjadi 66 menit. Kemudian peningkatan dilakukan dengan menambah kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam kebakaran menjadi 2 unit per pos pemadam serta meningkatkan jumlah mobil pompa yang siap dioperasikan menjadi 97%.

Dalam hal ketertiban masyarakat, telah ditingkatkan jumlah Poskamling aktif, sehingga berjumlah 175 pos kamling sampai dengan tahun 2013 dan diikuti oleh meningkatnya

jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar melalui kegiatan pembekalan potensi masyarakat dengan 2.400 orang peserta serta kegiatan pembinaan anggota linmas dan obyek vital dengan 3.840 orang peserta.

#### L. Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional.

Dalam hal pelayanan masyarakat, Pemerintah DKI menerbitkan sejumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan di kawasan Tanah abang, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Sentra Primer Barat, dan Sentra Primer Timur sebanyak 31.644 dokumen di tahun 2012 menjadi 35.242 dokumen di tahun 2013. Hal ini diikuti dengan meningkatnya Jumlah pelaku usaha yang dilengkapi aspek legal (SIUPP, TDP) dari 62.393 di tahun 2012 menjadi 67.098 di tahun 2013.

Kegiatan urusan perdagangan ini menghasilkan sejumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan dari 247.358 di tahun 2012 menjadi 254.309 di tahun 2013, serta meningkatnya nilai ekspor produk DKI Jakarta dari \$.964 juta di tahun 2012 menjadi \$.1.056,83 juta di tahun 2013. Yang kemudian berdampak meningkatnya jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI dari 20 pelaku usaha di tahun 2012 menjadi 100 pelaku usaha di tahun 2013.

Selain itu dalam hal perindustrian yang terkait dengan perdagangan, telah dilaksanakan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2013 di Monas dengan menghadirkan 125 IKM Kreatif di Provinsi DKI Jakarta.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

**Tabel 2.6.** Aspek Daya Saing dalam Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan DKI Jakarta

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
			2013	2014	2015
	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>				
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	57.208.758	58.302.027	59.223.127	60.009.760
	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur</b>				
1	Jumlah Lokasi kawasan TOD	0 TOD	1	2	2
2	Jumlah stasiun kereta api yang sudah mempunyai Rencana pengembangan kawasan	1/60	3	6	9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		
			2013	2014	2015
3	Persentase pengembangan Pantura Jakarta (Reklamasi dan Revitalisasi) yang sesuai rencana tata ruang	0%	0%	5%	10%
4	Panjang ruas jalan yang dilintasi :				
	- Panjang lintasan Busway	203,5 km	225,43	247,36	269,29
	- Panjang lintasan MRT	0	1,5	3,5	7,5
	- Panjang lintasan LRT	0	0	0,8	8,8
5	Jumlah penumpang :				
	- Busway	304.799 pnp/hari	400.000 pnp/hari	550.000 pnp/hari	730.000 pnp/hari
	- MRT	0	0	0	0
	- LRT	0	0	0	0
6	Prosentase prasarana KEK : Jalan Tol, pembangkit listrik, pengolahan air limbah, ITF, mess karyawan, akses masuk, angkutan umum.	0%	0%	5%	10%
7	Prosentase sarana KEK : Pelabuhan, <i>container yard</i> , pegudangan, industri <i>Hi-Tech</i> , bea cukai dan imigrasi terpadu.	0%	0%	5%	10%
8	Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun	42 titik	50 titik	75 titik	125 titik
	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>				
1	Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) :	PMDN . 9,84 Triliun PMA 45 Triliun	PMDN 10,59 Triliun PMA 48,48 Triliun	PMDN 11,38 Triliun PMA 52,09 Triliun	PMDN 12,15 Triliun PMA 55,62 Triliun
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA):	PMDN 89 proyek PMA 1.148 proyek	PMDN 91 proyek PMA 1.215 proyek	PMDN 94 proyek PMA 1.298 proyek	PMDN 96 proyek PMA 1.350 proyek

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2013

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan

secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, yang meliputi Program Unggulan dan Prioritas.

**Tabel 2.7.** Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 SKPD Provinsi DKI Jakarta

No.	SKPD	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE (%)
1	SEKRETARIAT DPRD	70.953.624.184	61.661.334.677	86,90 %
2	SEKRETARIAT KORPRI	6.982.260.000	4.969.571.910	71,17 %
3	INSPEKTORAT	37.145.763.388	32.944.904.580	88,69 %
4	BAPPEDA	13.950.000.000	12.681.465.770	90,91 %
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	21350000000	20285956441	95,02 %
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.750.000.000	9.518.950.750	97,63 %
7	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	154.590.322.900	139.860.248.647	90,47 %
8	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.317.636.250	23.732.639.400	97,59 %
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.588.588.202	2.778.495.625	77,43 %
10	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI	6.545.000.000	4.623.468.671	70,64 %
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	36.572.842.350	35.522.063.950	97,13 %
12	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP	12.589.121.358	11.955.297.882	94,97 %
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8.568.272.000	7.620.374.700	88,94 %
14	SATPOL PP	5.239.360.000	4.556.073.255	86,96%
15	DINAS TATA RUANG	12.750.000.000	8.253.432.000	64,73 %
16	DINAS SOSIAL	147.380.721.000	138.621.022.260	94,06 %
17	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	342.663.924.353	337.593.200.653	98,52 %
18	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	313.118.443.000	250.224.101.226	79,91 %
19	DINAS PERHUBUNGAN			
20	DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN	25.704.224.000	20.802.792.155	80,93 %
21	DINAS PENDIDIKAN	3.146.306.485.812	2.986.666.928.451	94,93 %
22	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	79.884.023.000	73.116.180.022	91,53 %
23	DINAS PELAYANAN PAJAK	34.372.363.414	27.234.858.920	79,23 %
24	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	302.480.200.000	276.113.156.137	91,28 %
25	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	97.567.460.110	36.799.319.321	37,72 %
26	DINAS KEBERSIHAN	875.492.788.013	77.340.184.1850	88,34 %
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.937.450.000	21.348.204.138	97,31 %

No.	SKPD	ANGGARAN		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PROSENTASE (%)
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	45.571.701.820	43.937.270.756	96,41 %
29	DINAS PEKERJAAN UMUM	829.886.414.955	499.558.799.378	60,20 %
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9.383.786.200	8.973.697.170	95,63 %
31	DINAS KESEHATAN	177.050.751.698	112.288.721.104	63,42 %
32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	39.655.388.770	35.205.590.646	88,78 %
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	135.046.077.500	87.746.195.407	64,98 %
34	BIRO UMUM	10.733.756.274	9.592.492.015	89,37 %
35	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.400.000.000	741.857.900	52,99 %
36	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.450.000.000	1.406.315.000	96,99 %
37	BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA	1.265.000.000	1.154.149.000	91,24 %
38	BIRO PEREKONOMIAN	1.409.200.000	1.191.062.500	84,52 %
39	BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA	3.107.830.000	2.756.285.410	88,69 %
40	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	18.844.398.440	17.999.932.322	95,52 %
41	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	13.439.470.000	10.079.090.747	75,00 %
42	BIRO HUKUM	4.455.000.000	3.651.396.360	81,96 %
43	BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.350.000.000	1.328.586.444	98,41 %

Selain itu, apabila dilihat dari sisi pencapaian Millenium Development Goals (MDG's), hasilnya dapat dilihat pada penjelasan dan tabel dibawah ini.

RAD Percepatan Pencapaian MDGs merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat pencapaian target MDGs hingga Tahun 2015. Tabel di bawah merupakan pencapaian target MDGs Provinsi DKI Jakarta hingga Tahun 2013. Berdasarkan tabel capaian tersebut, dapat diketahui tujuan yang saat ini targetnya telah tercapai dan tujuan yang masih memerlukan kerja keras dalam pencapaiannya. Sehingga langkah tindak lanjut dapat segera ditentukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

**Tabel 2.8.** Status Capaian Tujuan MDGs DKI Jakarta Tahun 2013

INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
1.1	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		3,48% (\$ 2,76 PPP) (2010)		BPS
	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional	7% (1990)	3,55 % (Maret 2013)	3,5%	BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3 (1990)	0,629 (2013)	1,5	BPS
1.4	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	124.464.366 (2005)	228.111.128 (2012)	398.289.887	BPS Disnakertrans
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15	54,07% (2000)	64,5% (2012)	63,48%	BPS Disnakertrans

INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
	Tahun ke atas				
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	25,93% (2000)	22,78% (2012)	31,26%	BPS Disnakertrans
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	31,0% (1989)*	12,9% (2007)** 11,3% (2010)** 15,6% (2009)***	15,5%	*Susenas (BPS) **Riskesdas (Kemenkes) 2007;2010 ***PSG
1.8a	Prevalensi balita gizi buruk	7,2% (1989)*	2,9% (2007)** 2,6% (2010)** 3,4% (2009)***	3,6%	KADARZI (Dinkes DKI) 2009;2010
1.8b	Prevalensi balita gizi kurang	23,8% (1989)*	10,0% (2007)** 8,7% (2010)** 12,2% (2009)**	11,9%	
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum				
	- 1400 Kkal/kapita/hari	17,00% (1990) *	14,63% (2009)* 17,56% (2010)*	8,50%	
	- 2000 Kkal/kapita/hari	64,21% (1990) *	tidak ada data	35,32%	
2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar	91.43	97,74 (2012)	99.50	Disdik
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Tidak ada data	99.16 (2010)	100	Disdik
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Tidak ada data	89.51 (2012)	100	Disdik
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99.76	99.58 (2010)	100	Disdik
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi				
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	124,74 (2000)	92.30 (2012)	100	Disdik
	- Rasio APM	86,76	100	100	*Disdik

INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
	perempuan/laki-laki di SMP	(2000)	(2012)* 95,68 (2010)**		**BPS DKI
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	86,76 (2000)	108,3 (2012)* 79,42 (2010)**	100	*Disdik **BPS DKI
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	70,61 (2000)	81,10 (2010)	90	Disdik
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24	108,4 (2000)	114,10 (2010)	100	Disdik
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	32,82 (1990)	65,64 (2012)	40,75	BPS DKI Disnakertrans
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	14,66 % (2004)	23% (2009)	30 %	Bakesbangpol
4.1	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	97 (1991)	36 (2007)	32	BPS (1991); SDKI
4.2	Angka Kematian Bayi (AK B) per 1.000 kelahiran hidup	68 (1991)	28 (2007)	23	(2007); Risksedas (2010)
4.2a	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	32 (1991)	15 (2007)	Menurun	
4.3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	44,5% (1991)	69,8% (2007) 76,7% (2010)	92%	
5.1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	390 (1991)	41 (2007)	102	BPS SDKI
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	40,7% (1992)	98,2% (2011)	Meningkat (90%- RPJMN 2014)	BPS Susenas
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara	49,7% (1991)	57,3% (2012)	Meningkat	SDKI
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern	47,1% (1991)	53,4% (2012)	Meningkat	RISKESDAS
5.4	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	67% (1991)	10,39% (2007)	Menurun	SDKI



INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
5.5	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)				
	- 1 kunjungan:	75% (1991)	89,2% (2010)	Meningkat	SDKI, BPS, RISKESDAS
	- 4 kunjungan:	56% (1991)	84,32% (2010)	Meningkat	
5.6	<i>Unmet Need</i> (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Tidak ada data	13,2 (2012)	Menurun	SDKI
6.1	Prevalensi <i>HIV/AIDS</i> (persen) dari total populasi	16 % (IBBS, Laporan Kemenkes 2007)	18%	<0,5	Kemenkes RI, Universitas Atmajaya
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	46 % (IBBS, Laporan Kemenkes 2007)	52%	65%	KemenKes RI
6.3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang <i>HIV/AIDS</i>	14,3% (SKRRI) 2007	53% (laporan bulanan perawatan HIV dan ARV Dinkes, Sept 2012)	95%	KemenKes RI, Universitas Atmajaya
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi <i>HIV</i> lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	Orang yg menjalani terapi ARV 65,8% (data tahun 2010 P2PL)	49.87% (hasil kajian Universitas Atmajaya 2010)	100%	KemenKes RI, Universitas Atmajaya
6.6	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria	0.01	0	Dipertahankan	Depkes 2009
6.6a	Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)	12.5 (1990)	0	Menurun	Depkes 2009
6.7	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu insektisida	75%	0%	Meningkat	Depkes 2009

INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
6.9	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkulosis				
6.9a	Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	343 (1990)	275 (2010)	265	Dinkes
6.9b	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	443 (1990)	244 (2009)	Menurun	
6.9c	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	92 (1990)	110	Mulai berkurang	
6.10	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS				
6.10 a	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	20% (2000)*	76.7% (Risksedas 2010)	70%	*laporan TB Global WHO, 2009
6.10 b	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87% (2000)*	91% (2009)	85%	*laporan TB Global WHO, 2009
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Tidak ada Data	Tidak ada data	Tidak ada data	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10,58%* (2000)	9,9%** (2010)	30% pada Tahun 2030	*Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) ** Bappeda
	Penanaman pohon pelindung		3.073.109 pohon (2010)	3.223.109 pohon	Dinas Pertamanan & Pemakaman
7.2	Jumlah emisi karbondioksida (CO2)	43,68 juta ton CO2(e) (2010)	55,07 juta ton CO2(e) (2011)	Berkurang 30% pada Tahun 2030	BPLHD
7.2a	Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)	33.722,3 GWH (2010)	36.915,3 GWH (2011)	53.288,2 GWH	Dinas Perindustrian & Energi (DPE)
7.2b	Intensitas Energi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	DPE

INDIKATOR		ACUAN DASAR	SAAT INI	TARGET MDG'S 2015	SUMBER
		data	data	data	
7.2c	Elastisitas Energi	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	DPE
7.2d	Bauran energi untuk energi terbarukan	Sampah 2 MW  Tenaga surya = 0,0160 MW (2010)	Sampah 8 MW  Tenaga surya = 0,0274 MW (2011)	Sampah 26 MW  Tenaga surya = 0,3124 MW	DPE
7.3	Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	BPLHD
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	DKP
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	63,21 (2000)	63,21 (2010)	63,21	DKP
7.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	15,43 (2000)	15,43 (2010)	15,43	DKP
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	50,58% (1993)	80,3%* (2007) 49,82%** (2009)	75,29%	* Riskesdas ** Susenas
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan	53,64% (1993)	64,1%* (2007) 69,51%** (2009)	76,82%	* Riskesdas ** Susenas
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	7.23 % (2008)	7.18 % (2009)	6.68%	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### 2.3.1. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Unggulan dan Prioritas Yang Tidak Mencapai Target

##### A. Sistem Transportasi

##### 1. Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Pengadaan Busway dan Bus Sedang yang tidak mencapai target dari rencana sebanyak 656 unit (310 unit Busway dan 346 Unit Bus Sedang) adalah karena

gagal lelang sebanyak 3 kali yang berdampak pada semakin sedikitnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan/mendatangkan bus impor dari negara asalnya, sehingga sampai dengan akhir tahun 2013 hanya dapat terealisasi sebanyak 125 unit busway, sedangkan untuk bis sedang tidak dapat direalisasikan.

## **2. Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel**

Pembebasan Lahan untuk Pembangunan MRT baru dapat dilaksanakan sebagian terutama pada koridor MRT, hal ini disebabkan karena belum tercapainya kesepakatan harga. Sedangkan pembebasan lahan untuk Depo MRT masih tersisa 4 bidang tanah tersebut milik negara yakni berupa Stadion Lebak Bulus dan lahan Polri, yang masih terkendala belum keluarnya ijin dari Pemerintah Pusat.

## **3. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan**

Belum terselesaikannya pembangunan jalan dan jembatan di beberapa lokasi dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan Multiyears, sedangkan tahun ini merupakan tahun pertama proses pembangunan yang meliputi kegiatan X-1 dan penyusunan DED. Untuk itu, kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada tahun 2014

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pada umumnya terkendala karena tidak terjadi kesepakatan harga dan lamanya proses pembuatan peta bidang oleh BPN.

### **B. Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan**

Proses pembebasan lahan terhambat akibat tidak tercapainya kesepakatan harga lahan dengan masyarakat.

### **C. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Kota**

#### **1. Program Kebijakan Pengembangan Perumahan**

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu saat ini belum selesai karena dokumen ini harus mengacu pada RDTR yang masih dalam proses pembahasan.

#### **2. Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung**

Terdapat beberapa data calon penerima hibah yang tidak valid. Untuk itu dilakukan verifikasi data calon penerima hibah dengan lebih selektif dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

### **D. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

#### **1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum**

Permasalahan pembangunan TPS ramah lingkungan diantaranya masih belum ditemukan lokasi yang sesuai untuk dibebaskan, untuk itu dilakukan identifikasi transito/dipo yang ada, untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi TPS standar ramah lingkungan.

Sementara itu permasalahan penanganan sampah di sungai adalah masa transisi pengelolaan sampah sungai. Untuk itu dilakukan pelatihan petugas dan penyusunan SOP pengelolaan sampah sungai.

## **2. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan**

Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengolah dan menjadikan sampah menjadi komoditas ekonomi. Untuk itu dilakukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk implementasi 3R dan pengembangan bank sampah.

## **E. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH**

### **1. Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**

Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah pembebasan lahan yang direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena :

- Pemilik tidak dapat menunjukkan dokumen asli/kepemilikan tidak jelas/sengketa
- Tidak terjadi kesepakatan harga
- Tidak ada akses jalan menuju ke lokasi
- Peruntukan yang tidak sesuai
- Lokasi masih dikuasai oleh pihak lain
- Ketidaksihinggaan lokasi rencana dengan nomenklatur kegiatan
- Lamanya proses pembuatan Peta Bidang oleh BPN

### **2. Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman**

Permasalahan yang dihadapi diantaranya sulitnya membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak swasta karena belum ada dasar hukum yang jelas untuk aturan pelaksanaan kerjasama dengan dana CSR tersebut.

## **F. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Pembangunan Mall Khusus bagi PKL belum dapat dilaksanakan, karena belum tersedianya lahan, hal ini disebabkan :

- Tidak adanya kesepakatan harga.
- Bukti kepemilikan untuk lokasi Ujung Menteng tidak lengkap
- Untuk lokasi Koja dan Cipayang merupakan lahan dalam penguasaan TMII

## **G. Pembangunan Budaya Multi-Kultur**

### **1. Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan**

Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan lingkungan dan benda cagar budaya. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan mitra/pengelola benda cagar budaya, perguruan tinggi dan komunitas/pemerhati cagar budaya.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan**

- Dalam pelaksanaan pembangunan di Zona C (pulau) terutama untuk pekerjaan sheet pile dan pembangunan dermaga, pelaksanaannya terganggu dengan adanya jembatan gantung eksisting.
- Sebagian lahan yang akan dibangun merupakan Peruntukan Hijau Umum (PHU).

## **H. Peningkatan Pelayanan Publik**

PTSP Kota sebagai Unit Pelaksana Pelayanan terpadu belum memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan layanan perizinan/non perizinan, karena masih melekat pada Badan/Dinas/lembaga lain.

## **I. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

### **1. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun**

Sulitnya menemukan nama dan alamat anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/tidak mampu yang berhak menerima KJP berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang disebabkan karena:

- Tidak tersedianya data / informasi terkait nama sekolah
- Sebagian nama yang tertera dalam data PPLS adalah nama panggilan sehingga sulit diverifikasi
- Terbatasnya SDM dan waktu dalam melakukan verifikasi data.

### **2. Program Peningkatan Sarpras Pendidikan**

Tidak selesainya beberapa rehab total gedung sekolah antara lain disebabkan oleh penyesuaian dengan jadwal ujian sekolah kelas VI dan IX serta terlambatnya proses penghapusan gedung sekolah

### **3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan**

Tidak terlaksananya pengadaan Bantuan Buku untuk siswa SMP/MTs Swasta dikarenakan adanya pergantian Kurikulum di Tahun 2013.

## **J. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat**

### **1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah**

Meningkatnya jumlah pasien yang langsung berobat ke rumah sakit pasca pemberlakuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena masyarakat belum memahami sistem rujukan.

### **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kesehatan**

- Tidak terlaksananya pengembangan Puskesmas Kecamatan Pademangan dan Cengkareng karena kondisi fisik bangunan puskesmas dimaksud tidak memadai.
- Tidak terlaksananya kegiatan pembangunan RSUD Pasar Minggu yang disebabkan karena gagal lelang.

### 2.3.2. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

#### A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan Belanja Langsung yang relatif rendah antara lain :

- 1) Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sejumlah 3.315 kegiatan dari 52.836 kegiatan atau 6,27 %, dengan jumlah anggaran mencapai Rp1,94 Triliun atau 6,13 % dari total belanja langsung. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagian besar akibat kesalahan kode rekening dan kurangnya persyaratan administrasi pendukung lainnya termasuk terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan. Sebagai contoh kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :
  - a) Pengadaan lahan untuk UKM di 5 Wilayah
  - b) Biaya Operasional Buku (BOB) SMP/MTs Swasta
  - c) Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama Rumah Sakit Jakarta Selatan
  - d) Pengadaan Multipurpose Dregging
  - e) Pembebasan Lahan untuk RTH Jl.TB.Simatupang Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan

Khusus permasalahan dalam pembebasan lahan adalah tidak tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah dan administrasi teknis tanah tidak memenuhi syarat antara lain seperti status kepemilikan sertifikat yang belum jelas.
- 2) Adanya kegiatan yang sudah diselesaikan persiapannya tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya (selesai dibawah 25 %) sejumlah 687 kegiatan dari 52.836 atau 1,30 % dengan jumlah anggaran mencapai Rp837,10 Milyar atau 2,65 % dari total belanja langsung. Kegiatan tersebut antara lain:
  - a) Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler
  - b) Pembangunan Separator Busway
  - c) Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Cimanggis, Jakarta Timur
  - d) Pembebasan Lahan Waduk Brigif Kelurahan Cipadak Jagakarsa, Jakarta Selatan lanjutan
  - e) Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter Lanjutan
- 3) Adanya kegiatan yang dilakukan efisiensi termasuk efisiensi dalam pelelangan (pengadaan barang dan jasa) dan kegiatan yang sebagian besar sudah dilaksanakan namun belum selesai 100 % sejumlah 4.274 kegiatan atau 8,09 %, dengan total jumlah efisiensi anggaran mencapai Rp3,99 Triliun atau 12,65 % dari total belanja langsung. Kegiatan tersebut antara lain:
  - a) Pembangunan Fasilitas Pendukung Perkampungan Budaya Betawi di Zona C
  - b) Pembebasan Lahan TPU Pondok Ranggong, Jakarta Timur
  - c) Penanganan Sampah Sungai dan Taman
  - d) Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah

- e) Pembangunan Tanggul Pengaman pantai
- 4) Adanya sisa administrasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan sejumlah Rp153,17 Milyar atau 0,48 % dari total belanja langsung.

## B. Solusi

- 1) Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi kegiatan melalui bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran serta perbaikan sistem informasi perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pelaksanaan yang terintegrasi.
- 2) Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi berjenjang serta memberikan peringatan kepada SKPD yang target kinerjanya tidak tercapai.
- 3) Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- 4) Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang yang tengah mengerjakan proyek fisik pembangunan infrastruktur di ibukota, maupun dari rekanan pengadaan barang dan jasa.

### 2.3.3. Keselarasan dengan Isu Strategis Nasional

Selain dengan isu-isu strategis daerah, program-program prioritas pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015. Penyelarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9** Penyelarasan Isu Strategis Nasional dengan Program Prioritas Tahun 2015

No.	Nasional		Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta
	Bidang Pembangunan	Isu Strategis	
1.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
		b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembinaan Upaya Kesehatan</li> <li>• Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul>
		c. Pengendalian Jumlah Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Keluarga Berencana</li> <li>• Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ul>
		d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM</li> <li>• Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi</li> <li>• Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM</li> <li>• Program Pemberdayaan UMKM</li> </ul>



No.	Nasional		Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta
	Bidang Pembangunan	Isu Strategis	
		e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan</li> <li>• Program Peningkatan Mutu Pendidikan</li> </ul>
2.	Ekonomi	a. Transformasi Struktur Industri	Program Pengembangan dan Pengendalian Industri
		b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja</li> <li>• Program peningkatan kesempatan Kerja dan peningkatan sistem pelayanan penempatan tenaga kerja</li> </ul>
3.	Sarana dan Prasarana	a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>• Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan</li> </ul>
		b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih</li> <li>• Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah</li> <li>• Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan</li> </ul>
		c. Penataan Perumahan / Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan Perumahan Rakyat</li> <li>• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat</li> <li>• Program Kebijakan Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung</li> </ul>
		d. Ketahanan Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir</li> <li>• Program Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>• Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Drainase</li> </ul>
		e. Pembangunan transportasi massal perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan</li> <li>• Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel</li> </ul>
4.	Pengelolaan SDA dan	a. Perkuatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengamanan ketersediaan pangan,</li> </ul>

No.	Nasional		Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta
	Bidang Pembangunan	Isu Strategis	
	Lingkungan Hidup		<p>pengendalian Akses, Harga, Promosi, dan Distribusi/Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>• Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan</li> <li>• Program peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan ( kesmavet )</li> </ul>
		b. Peningkatan Ketahanan Energi	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
		c. Percepatan pembangunan kelautan	Program Pembangunan Transportasi Perairan
		d. Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan</li> <li>• Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman</li> <li>• Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman</li> </ul>
5.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Perkuatan kapasitas IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik</li> </ul>
6.	Politik	Konsolidasi Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>• Program Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ul>
7.	Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat</li> <li>• Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik</li> </ul>
8.	Hukum dan Aparatur	a. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan</li> <li>• Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> </ul>
		b. Peningkatan kapasitas	• Program Peningkatan Kapasitas

No.	Nasional		Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta
	Bidang Pembangunan	Isu Strategis	
		kelembagaan publik	Sumber Daya Aparatur DKI Jakarta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</li> <li>• Program Penguatan Hubungan Kelembagaan</li> </ul>
		c. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik</li> <li>• Program Penataan dan Pengelolaan Ketatalaksanaan Kota/Kabupaten</li> <li>• Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ul>
9.	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	pengelolaan risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> <li>• Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana</li> </ul>